

Analisis *Functional Theory* dan Isu kebijakan dalam Debat Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Luh De Rat Yuningsih^{1*}, Ikhsan Fuady², Kunto Adi Wibowo³, Dzikrifa Ningtyas Aliifa⁴

^{1*,2,3,4}Universitas Padjajaran

Corresponding Author's e-mail : luh24002@mail.unpad.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3892 - 3903

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4038>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4038>

Article History:

Received: 19-08-2026

Revised: 25-10-2026

Accepted: 27-10-2026

Abstract : This study aims to determine the Functional Theory in the Pekalongan Regency Pilkada Debate. This study was conducted with a quantitative approach with a content analysis method focused on the distribution of acclaim, attack, and defense functions, as well as policy issues in the form of past deeds and future plans of each winning and losing candidate, to understand the differences in strategies in influencing public opinion. The research data was obtained from the broadcast of the 2024 Pekalongan Regency Pilkada debate which can be fully accessed through the Youtube channel. Before the coding process, the coder conducted an intercoder reliability test to minimize subjectivity in the data coding process by using a coding book and a web-based instrument ReCal2Proses. After the coding process, 305 utterances remained from 332 total utterances. The results showed that the acclaim function was the most frequently used function by both candidates (64%), followed by the attack function (42%), and defense (11%). Hypothesis testing using Chi-square indicates no significant difference between the use of discourse functions (acclaim, attack, defense) between the winning and losing candidates in the regional election debates, with a p -value of $0.545 > 0.05$ (H_1 is rejected). Conversely, there is a very significant difference between candidates 01 and 02 in terms of emphasizing policy issues during the regional election debates, with a p -value of $0.001 < 0.05$ (H_2 is accepted).

Keywords: Acclaim, Attack, Political Debate, Defense, Functional Theory

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *functional theory* dalam debat pilkada Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi yang difokuskan pada distribusi fungsi *acclaim*, *attack*, dan *defense*, serta isu kebijakan (*policy*) berupa past deeds dan future plans dari masing-masing kandidat menang dan kalah, untuk memahami perbedaan strategi dalam memengaruhi opini publik. Data penelitian diperoleh dari tayangan debat Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 yang dapat diakses secara penuh melalui kanal Youtube. Sebelum proses pengkodean, *coder* melakukan uji *intercoder reliability* untuk meminimalkan subjektivitas dalam proses pengkodean data dengan menggunakan coding book dan instrumen berbasis web ReCal2. Setelah proses pengkodean, tersisa 305 ujaran dari 332 total ujaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *acclaim* merupakan fungsi yang paling sering digunakan oleh kedua kandidat (64%), diikuti fungsi *attack* (42%), dan *defense* (11%). Uji hipotesis menggunakan Chi-square mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan fungsi wacana (*acclaim*, *attack*, *defense*) antara kandidat menang dan kalah dalam debat pilkada dengan nilai $p = 0,545 > 0,05$ (H_1 ditolak). Sebaliknya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kandidat 01 dan 02 dalam hal menekankan isu kebijakan selama debat pilkada berlangsung dengan nilai $p = 0,001 < 0,05$ (H_2 diterima).

Kata Kunci : *Acclaim*, *Attack*, Debat Politik, *Defense*, Functional Theory

PENDAHULUAN

Demokrasi secara luas diartikan sebagai sistem politik dimana warga negara memegang otoritas kedaulatan dan memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan yang kompetitif (Dahl, 1971). Di Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum,

termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam memilih pemimpin daerah sehingga memperkuat akuntabilitas dan representasi politik (Fakuoka, 2013). Pilkada bukan hanya kompetisi politik tetapi sebagai wadah komunikasi publik antara calon pemimpin daerah dan rakyat. Wadah komunikasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan debat politik.

Dalam sistem demokrasi modern, debat politik menjadi salah satu instrumen utama dalam komunikasi politik. Debat politik merupakan forum formal bagi para aktor politik untuk menyampaikan pandangan mereka, mengkritik atau menanggapi argumen lawan, serta membangun citra politik di hadapan publik (Marzuki *et al.*, 2025). Melalui debat, kandidat dapat menunjukkan kualitas kepemimpinan, penguasaan terhadap isu-isu yang terjadi, serta kemampuan mereka dalam menyampaikan argumentasi yang persuasif kepada publik. Selain itu, keputusan pemilih dalam menentukan calon kepala daerah juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kebijakan dan kualitas kepemimpinan kandidat, sehingga strategi komunikasi politik yang digunakan dalam debat menjadi faktor penting dalam membentuk opini dan preferensi pemilih (McNair, 2017; Norris, 2000).

Dalam konteks Pilkada, debat politik juga menjadi ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, kualitas pribadi, serta gaya kepemimpinan mereka kepada masyarakat (Shanti *et al.*, 2025). Sidney Kraus dalam Perloff (1998) bahkan menyatakan bahwa tujuan utama debat politik bukanlah semata-mata untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melainkan untuk memenangkan kontestasi politik yang artinya mampu meyakinkan publik. Upaya kandidat dalam meyakinkan publik melalui penyampaian gagasan tersebut menunjukkan bahwa debat politik bersifat persuasif. Dari sudut pandang kandidat, debat merupakan sarana strategis untuk menarik dukungan pemilih, memperkuat basis suara, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kelayakan untuk memimpin. Bagi pemilih, debat politik berfungsi sebagai sarana untuk mengenal kandidat secara lebih mendalam, termasuk memahami cara berpikir, nilai-nilai yang dianut, serta karakter kepemimpinan yang ditampilkan oleh masing-masing kandidat. Sementara itu, dalam konteks sistem politik, debat juga memiliki fungsi edukatif karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik serta mendorong berkembangnya kesadaran politik publik (Damayanti, 2015).

Debat dalam konteks pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan disiarkan melalui stasiun televisi nasional. Penyelenggaraan debat ini merupakan salah satu metode yang relatif baru dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden di Indonesia. KPU merancang format debat presiden dengan mengadaptasi model debat kandidat presiden di Amerika Serikat, seperti debat antara Barack Obama dan John McCain (Damayanti, 2015). Kebijakan tersebut diambil karena metode kampanye rapat terbuka yang selama ini digunakan dinilai kurang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu, kampanye terbuka juga dianggap membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian, kegiatan debat melalui media sosial memiliki efek yang besar, karena mampu mempengaruhi keputusan pemilih terutama pengguna aktif media sosial (Laras Weninggalih & M.E Fuady, 2021; Salman Farid, 2023; Wiwid, 2024).

Debat Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 diselenggarakan pada awal November 2024 dan disiarkan secara daring melalui kanal Youtube resmi KPU dan Kompas TV Pekalongan. Debat ini tidak sekadar menjadi formalitas elektoral, melainkan sebuah instrumen komunikasi politik strategis dimana pasangan nomor urut 01 (Fadia A. Rafiq–Sukirman) yang merupakan Bupati Pekalongan pada periode berjalan. Adapun pasangan nomor urut 02 (Riswadi–Mukhammad Amin), merupakan kandidat yang diusung oleh PDIP. Kedua pasangan calon Bupati dan calon wakil bupati ini menyampaikan visi-misi serta program kerja secara terbuka di hadapan publik. Hasil pemilihan umum kepala daerah menunjukkan bahwa pasangan urut 01 meraih 56,24% suara atau setara dengan 306.443 orang, sedangkan Riswadi–Mukhammad Amin meraih 238.486 suara (43,76%) (KPU, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2015) bahwa pada era 1970-an hanya terdapat empat negara yang memperbolehkan iklan politik di televisi, yaitu Amerika Serikat,

Jepang, Australia, dan Kanada. Namun pada akhir 1990-an jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 50 negara yang memanfaatkan ruang publik televisi untuk iklan politik. Seiring dengan perkembangan tersebut, debat antar kandidat yang disiarkan melalui televisi juga semakin dipandang sebagai faktor penting dalam proses komunikasi politik. Dari sisi jumlah penyelenggaraannya, selama periode 1970–1999 negara yang melaksanakan debat politik di televisi meningkat dari sekitar 10 negara menjadi kurang lebih 35 negara. Sejak debat Kennedy–Nixon pada tahun 1960 yang disiarkan melalui televisi, analisis terhadap debat politik mulai menarik perhatian para peneliti (Benoit & Harthcock, 1999). Debat tersebut dianggap sebagai salah satu momen penting dalam perkembangan komunikasi politik modern karena memperlihatkan bagaimana penampilan kandidat di media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap calon pemimpin.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran debat politik dalam proses komunikasi politik dan pembentukan opini publik. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji strategi komunikasi politik yang digunakan kandidat dalam debat politik. Studi terbaru yang dilakukan oleh Sonnsjö (2024) di Swedia menganalisis perdebatan politik terkait isu pasokan listrik yang terjadi di parlemen dan media. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktor politik secara selektif membingkai isu kebijakan untuk memperkuat posisi mereka di hadapan publik. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi, seperti menonjolkan capaian diri (*acclaim*), menyerang pihak lawan (*attack*), maupun melakukan pembelaan terhadap kritik (*defense*). Temuan ini menegaskan bahwa debat politik selalu memiliki dimensi strategis yang dapat dianalisis melalui kerangka *functional theory*, sehingga pendekatan tersebut relevan digunakan untuk mengkaji dinamika debat politik dalam kontestasi Pilkada di Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Shanti et al. (2025) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam strategi komunikasi yang digunakan oleh dua kandidat dalam debat politik. Hasil uji chi-square menunjukkan nilai statistik $p < 0,001$, yang mengindikasikan perbedaan signifikan dalam penggunaan strategi fungsi komunikasi (*acclaim*, *attack*, *defense*) serta aspek *personal qualities*, seperti kemampuan kepemimpinan dan nilai atau prinsip yang ditampilkan kandidat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandidat pertama lebih dominan menggunakan strategi *defense* serta menonjolkan kemampuan kepemimpinan, sedangkan kandidat kedua lebih banyak menggunakan strategi *acclaim* dan *attack* untuk menonjolkan citra serta posisi politiknya di hadapan publik.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mulantara et al. (2025) yang berjudul “*Strategic Discourse in a Non-Competitive Election Debate: Content Analysis of the 2024 West Papua Gubernatorial Campaign*” menunjukkan bahwa fungsi *acclaim* mendominasi dalam debat politik dengan persentase 94,24%, di mana 68,88% pernyataan berfokus pada rencana masa depan kandidat. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya lawan debat, sehingga penggunaan strategi *attack* hanya muncul sebesar 0,58% dan *defense* sebesar 5,19%, yang menunjukkan sangat minimnya strategi komunikasi yang bersifat konfrontatif. Hasil uji statistik juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara fungsi wacana politik dengan konten kebijakan yang disampaikan kandidat. Secara keseluruhan, strategi komunikasi pasangan calon dalam debat tersebut lebih bersifat afirmatif dan berorientasi pada visi masa depan, dengan menekankan citra diri serta program yang akan dilakukan dibandingkan melakukan serangan atau pembelaan terhadap lawan politik. Dalam debat politik, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ide, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan oleh aktor politik untuk membangun konstruksi makna di benak khalayak (Damayanti, 2015). Melalui penggunaan bahasa, aktor politik berupaya mengarahkan persepsi publik sehingga memengaruhi cara masyarakat memandang dan menginterpretasikan suatu realitas.

Dalam kajian komunikasi politik, salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menganalisis debat politik adalah *functional theory*. Kerangka ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi kandidat dalam debat umumnya dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu *acclaim* (menonjolkan kelebihan diri), *attack* (mengkritik atau menyerang lawan), dan *defense* (membela diri dari kritik atau serangan) (Benoit & Harthcock, 1999). Dalam praktiknya, wacana yang muncul dalam debat politik biasanya berkaitan dengan dua fokus utama, yakni isu kebijakan

(*policy*) dan aspek karakter (*character*) kandidat. Namun dalam banyak debat politik, pembahasan mengenai kebijakan seringkali menjadi elemen yang dominan karena berkaitan langsung dengan program, rencana kerja, serta solusi yang ditawarkan kandidat terhadap permasalahan publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menerapkan pendekatan *functional theory* untuk mengkaji strategi komunikasi dalam debat politik di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh Ajilore (2015) di Nigeria menunjukkan bahwa kandidat cenderung menggunakan strategi *acclaim* untuk menonjolkan keberhasilan atau rencana kebijakan yang mereka tawarkan kepada publik. Sementara itu, studi Dudek dan Partacz (2009) di Polandia menemukan bahwa strategi *attack* sering digunakan untuk melemahkan citra lawan politik, khususnya dengan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak efektif. Di Indonesia, penelitian Hidayah dan Kweldju (2022) juga menunjukkan bahwa debat politik menjadi ruang penting bagi kandidat untuk mengonstruksi pesan kebijakan serta mempengaruhi persepsi pemilih terhadap program yang ditawarkan.

Meskipun demikian, kajian mengenai strategi komunikasi dalam debat politik pada tingkat Pilkada, khususnya yang berfokus pada isu kebijakan (*policy*), masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks pemilihan kepala daerah, debat politik sering menjadi salah satu sarana utama bagi kandidat untuk menyampaikan rencana kebijakan daerah sekaligus membangun citra kepemimpinan di hadapan masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mulantara *et al.* (2025) mengenai debat pemilihan gubernur Papua Barat 2024 menunjukkan bahwa strategi komunikasi kandidat cenderung berfokus pada penciptaan persepsi positif melalui penekanan pada rencana masa depan. Hasil penelitian mengenai isu kebijakan (*policy*) bahwa “Serangan lebih banyak pada arah kebijakan dan sedikit mengenai karakter lawan. Adanya bentuk cara bertahan kandidat dimana ketika diserang oleh lawannya maka dapat mempertahankan dirinya dari serangan dalam penyampaian pesan kampanye. Dalam memberikan alasan dari serangan lawan masih kurangnya konsistensi mengulas kebijakan (*issue*) atau karakter (*image*), sehingga kandidat juga dinilai belum mampu bertahan sesuai dengan topik yang diserang. Beberapa kali waktu pertahanan dapat mencegah kerugian dalam serangan dan hal ini memungkinkan bahwa sebagian atau secara menyeluruh mempengaruhi keterpilihan kandidat.”

Adapun hipotesis yang diajukan yaitu:

H1: Terdapat perbedaan penggunaan fungsi (*acclaim*, *attack*, dan *defense*) antara kandidat menang dan kalah.

H2: Terdapat perbedaan penekanan isu kebijakan (*policy*) yang disampaikan oleh kandidat menang dan kalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu pendekatan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur untuk menganalisis isi pesan komunikasi guna menemukan pola tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi komunikasi politik dalam debat Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024. Analisis difokuskan pada distribusi fungsi *acclaim*, *attack*, dan *defense*, serta isu kebijakan (*policy*) berupa *past deeds* dan *future plans* dari masing-masing kandidat menang dan kalah, untuk memahami perbedaan strategi dalam memengaruhi opini publik.

Sumber data penelitian ini adalah video lima sesi debat Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024 yang diselenggarakan pada 9 November 2024. Video debat diakses melalui kanal YouTube KPU Kab Pekalongan sebagai sumber resmi dan kredibel. Data penelitian berupa seluruh ujaran kandidat dalam debat yang dijadikan sebagai unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pernyataan verbal kandidat, dengan total sebanyak 332 unit analisis dari debat sebelum di filter, setelah difilter total unit analisis menjadi 305. Penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling (Sugiyono, 2020), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Pada penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik saat debat Bupati Kabupaten Pekalongan 2024 dalam lima sesi debat berupa wacana fungsional (*acclaim*, *attack*, *defense*) dan isu kebijakan (*policy*) yang mengadaptasi *coding book* dari (Benoit & Harthcock, 1999). Pada penelitian ini analisis strategi komunikasi politik dalam debat Pilkada Bupati Kabupaten Pekalongan 2024 yang terdiri dari lima sesi. Analisis difokuskan pada wacana fungsional (*acclaim*,

attack, defense) serta isu kebijakan (*policy*) dengan mengadaptasi coding book dari Benoit dan Harthcock (1999). Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengklasifikasikan 332 pernyataan verbal kandidat sebagai unit analisis oleh *dua coder*. Setiap unit dianalisis dan dikodekan sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam coding book.

Proses pengkodean dilakukan terhadap seluruh unit analisis dengan melibatkan dua *coder* untuk meminimalkan subjektivitas dan meningkatkan reliabilitas data. Pengkodean mengacu pada *coding book* yang dikembangkan berdasarkan kategori fungsional (*acclaim, attack, defense*) dan isu kebijakan (*policy*) (Benoit & Harthcock, 1999). Setiap coder mengklasifikasikan pernyataan kandidat ke dalam kategori yang telah ditetapkan, kemudian memberikan kode pada masing-masing unit analisis.

Sebelum proses pengkodean penuh, para coder akan melakukan uji reliabilitas antar-coder (*intercoder reliability*) untuk meminimalkan subjektivitas dalam proses pengkodean data dengan menggunakan *coding book* sebagai acuan untuk menjadi kualitas data yang dihasilkan. Penelitian ini menerapkan uji reliabilitas antar coder (*intercoder reliability*) menggunakan instrumen berbasis web ReCal2 (*Reliability Calculator for 2 coders*) <https://dfreelon.org/utis/recalfront/recal2/> untuk memperoleh koefisien reliabilitas antara dua coder pada data nominal yang dikodekan oleh dua coder (Aliifa et al., 2025). yang dikembangkan oleh Freelon (2010). Pengujian dilakukan dengan mengunggah data matriks berpasangan di mana setiap baris mewakili unit analisis tunggal dan kolom berisi kode numerik eksklusif yang merepresentasikan kategori variabel yang diteliti. Melalui ReCal2, tingkat kesepakatan diukur secara simultan menggunakan empat metrik statistik utama, yaitu *Percent Agreement*, *Scott's Pi*, *Cohen's Kappa*, dan Krippendorff's Alpha untuk mengoreksi faktor kesepakatan secara kebetulan (*chance agreement*) serta memberikan estimasi reliabilitas yang kokoh (*robust*) untuk ukuran sampel kecil. Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan SPSS melalui *crosstabs* dan uji *chi-square* (χ^2) untuk menguji perbedaan penggunaan *function* dan *personal qualities* antar kandidat. Uji ini digunakan karena data bersifat kategorik, dengan tingkat signifikansi $p < 0,01$ (Riffe et al., 2019).

Pengujian reliabilitas dilakukan sebanyak tiga kali. Proses pertama, menggunakan sampel yang diberikan oleh dosen pengampu sebanyak 40 sampel. Proses kedua, menggunakan sampel dari kelompok Kabupaten Semarang sebanyak 50 sampel. Proses ketiga, menggunakan sampel dari kelompok Kota Tegal sebanyak 50 sampel. Ada banyak perbedaan dari ketiga uji yang telah dilakukan, yaitu uji pertama hasil yang didapat datanya tidak reliabel. Ini terjadi karena para coder tidak menyamakan persepsi coder.

Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas antar-coder (*intercoder reliability*) untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Uji reliabilitas dilakukan terhadap 15% sampel data yang dipilih secara acak, dengan melibatkan coder yang mengkodekan data secara terpisah. Pengukuran reliabilitas menggunakan koefisien Krippendorff's Alpha, yang dianggap memadai apabila mencapai nilai $\geq 0,70$ (Riffe et al., 2019). Hasil pengujian menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,941 untuk kategori fungsi (*function*) dan 0,815 untuk kategori policy, yang mengindikasikan tingkat reliabilitas yang tinggi sehingga data layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Kandidat	<i>Acclaim</i>	<i>Attack</i>	<i>Defense</i>	Total	Persentase
1	99 (67%)	33 (22%)	16 (11%)	148	100%
2	96 (61%)	43 (27%)	18 (12%)	157	100%
Total Ujaran	195 (64%)	76 (25%)	34 (11%)		

Sumber (Olah data peneliti, 2026).

Tabel 1 memaparkan distribusi ujaran yang dikemukakan oleh masing-masing kandidat. Pada penelitian ini, kandidat dengan nomor urut 1 merupakan pemenang kontestasi Pilkada Kabupaten Lamongan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Kemenangan ini merupakan

kemenangan kedua bagi Fadia Arafik Sebagai bupati Kabupaten Pekalongan. Adapun pasangan nomor urut 2, pada penelitian ini, diidentifikasi sebagai kandidat kalah.

Ujaran bersifat *acclaim* mendominasi keseluruhan panggung debat dengan total 195 ujaran (64%). Selanjutnya, ujaran yang menyerang lawan bicara hanya sebesar 25% (76 ujaran). Strategi pembelaan diri (*defense*) menjadi fungsi yang paling sedikit digunakan, yakni sebanyak 34 ujaran atau setara dengan 11% dari total keseluruhan ujaran.

Jika ditelisik lebih dalam, kedua calon memiliki kecenderungan komunikasi untuk memperkuat citra positif di khalayak umum. Hal ini terlihat dari besaran ujaran bersifat *acclaim* yang mendominasi lebih 50% dari keseluruhan ujaran dalam debat. Sebagai pemenang kontestasi Pilkada Kabupaten Pekalongan di tahun 2024, kandidat nomor urut 1 menggunakan ujaran dengan fungsi *acclaim* sebanyak 99 kali. Kandidat pemenang fokus pada penguatan citra positif, pemaparan keberhasilan selama masa jabatan pada periode pemerintahan sebelumnya, dan pengenalan program unggulan untuk mempertahankan optimisme pemilih, sekaligus menjaring pemilih baru. Kandidat pemenang juga terlihat membatasi penyerangan terhadap lawan debatnya. Hal ini terlihat dari ujaran dengan strategi *attack* hanya digunakan sebanyak 33 kali. Pola komunikasi yang cenderung bermain aman ini juga didukung dengan ujaran yang bersifat *defense* untuk menetralkan kritik dari lawan bicara dengan tetap mempertahankan fokus untuk mempromosikan diri. Ujaran bersifat *defense* digunakan sebanyak 16 kali dalam debat.

Sementara itu, kandidat kalah menggunakan strategi komunikasi yang cukup beragam daripada kandidat menang. Selain menggunakan ujaran *acclaim* sebagai mayoritas ujaran dalam debatnya, kandidat kalah juga memberikan ruang yang lebih leluasa untuk menyampaikan pendapatnya dalam bentuk serangan kepada lawan debat yakni sebesar 43 ujaran atau setara dengan 27%. Terakhir, ruang untuk membela diri (*defensif*) tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara kandidat menang dan 02. Hal ini memperlihatkan kecenderungan yang relatif seimbang dengan Kandidat menang dalam hal efisiensi durasi bertahan.

Untuk menguji apakah perbedaan persentase secara deskriptif memiliki signifikansi secara statistik, penelitian ini menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai $\chi^2(2, N = 305) = 1,215$, $p = 0,545$, dengan ukuran efek Cramér's $V = 0,063$. Nilai p yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam penggunaan fungsi wacana (*acclaim*, *attack*, dan *defense*) antara kandidat pemenang dan kandidat yang kalah dalam debat Pilkada. Nilai Cramér's V sebesar 0,063 menunjukkan bahwa hubungan antara status kemenangan kandidat dan penggunaan fungsi wacana tergolong sangat lemah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persentase yang ditemukan secara deskriptif tidak didukung oleh bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan penggunaan fungsi wacana antara kedua kelompok kandidat. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hipotesis pertama (H1) tidak didukung oleh data penelitian.

Tabel 2. Penekanan Isu Kebijakan Masing-Masing Paslon

<i>Policy</i>	Kandidat 01 (Menang) F (%)	Kandidat 02 (Kalah) F (%)	Total Ujaran F (%)
1 (rekam jejak)	60 (40%)	27 (17%)	87 (29%)
2 (rencana masa depan)	31 (21%)	74 (47%)	105 (34%)
Bukan isu kebijakan	57	56	113
Total	148 (100%)	157 (100%)	305 (100%)

(sumber: Olah Data Peneliti, 2026)

Berdasarkan penjabaran data pada tabel 2 terlihat bahwa kedua kandidat secara berimbang menyampaikan ujaran yang tidak termasuk kedalam isu kebijakan. Kandidat 1 (pemenang) menyampaikan sebanyak 57 ujaran dan kandidat 2 (kalah) menyampaikan sebanyak 56 ujaran. Namun, terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua kandidat saat menyampaikan rekam jejak. Kandidat 1 terlihat mendominasi debat dengan menyampaikan keberhasilan masa lalu. Sementara itu, kandidat 2 hanya memproduksi 27 ujaran pada kategori ini. Kandidat nomor 2

justeru terlihat menguasai panggung debat saat menyampaikan rencana masa depan (*future plans*) dengan menyampaikan rencana program kerja dengan jumlah ujaran sebanyak 74. Sementara itu, kandidat1 hanya menyampaikan 31 ujaran (21%).

Pengujian hipotesis kedua (H2) dilakukan menggunakan uji *Chi-Square* untuk menganalisis perbedaan penekanan isu kebijakan berupa *past deeds* dan *future plans* antara kandidat pemenang dan kandidat yang kalah dalam debat Pilkada. Pengujian dilakukan terhadap 192 ujaran yang dikategorikan sebagai isu kebijakan. Hasil pengujian menunjukkan nilai $\chi^2(1, N = 192) = 29,686$, $p < 0,001$, dengan ukuran efek Cramér's $V = 0,393$. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik dalam penekanan kedua kategori isu kebijakan antara kandidat pemenang dan kandidat yang kalah. Kandidat pemenang lebih banyak menekankan *past deeds* sebanyak 60 ujaran (65,9%) dibandingkan *future plans* sebanyak 31 ujaran (34,1%). Kandidat yang kalah lebih banyak menekankan *future plans* sebanyak 74 ujaran (73,3%) dibandingkan *past deeds* sebanyak 27 ujaran (26,7%). Temuan ini menunjukkan bahwa kandidat pemenang cenderung menonjolkan kebijakan atau tindakan masa lalu, sedangkan kandidat yang kalah cenderung menekankan rencana kebijakan masa depan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hipotesis kedua (H2) didukung oleh data penelitian.

Kategori bukan isu kebijakan dimasukkan dalam analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai distribusi ujaran yang disampaikan oleh kandidat pemenang dan kandidat yang kalah dalam debat Pilkada. Kategori ini mencakup ujaran yang tidak diklasifikasikan sebagai *past deeds* maupun *future plans* berdasarkan pedoman pengodean penelitian. Keberadaan kategori tersebut memungkinkan perbandingan proporsi antara ujaran kebijakan dan ujaran di luar kebijakan. Pengujian hipotesis kedua (H2) secara khusus difokuskan pada perbedaan penekanan *past deeds* dan *future plans*. Oleh karena itu, uji *Chi-Square* untuk H2 hanya menggunakan 192 ujaran yang termasuk dalam kategori isu kebijakan, sedangkan 113 ujaran bukan isu kebijakan tetap disajikan dalam analisis deskriptif.

Pembahasan

Penolakan statistik terhadap Hipotesis 1 menunjukkan bahwa perbedaan nilai yang diungkapkan dalam distribusi fungsi kata antara kandidat 01 dan 02 tidak signifikan. Kedua kandidat menggunakan praktik retorika yang sangat mirip, dimana *acclaim* mendominasi ujaran yang digunakan sepanjang debat (64%), diikuti dengan ujaran *attack* dan *defense* dengan persentase masing-masing 34% dan 11%. Temuan ini menunjukkan adanya *strategic mimicry* dalam komunikasi politik dimana para kandidat mengurangi risiko dengan meniru pola komunikasi pesaing mereka yang lebih aman dan lebih dapat diterima publik.

Penggunaan fungsi *acclaim* yang mendominasi debat politik antara kandidat 01 dan 02 sejalan dengan temuan Mulantara et al., (2025) dimana wacana dengan nuansa afirmatif citra diri mencapai angka mayoritas mutlak pada debat Pilkada Papua Barat. Temuan ini memperlihatkan kesamaan pola fungsional dalam komunikasi politik Indonesia meskipun terjadi pada wilayah dan kondisi sosiopolitik yang berbeda. Kandidat tidak menggunakan panggung debat sebagai arena untuk memperkenalkan pola pikir dan ideologi. Sebaliknya, kontestasi debat pilkada dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan basis massa yang sudah ada sekaligus menarik simpati massa pemilih yang belum menentukan pilihan.

Keseragaman fungsi pada tingkat makro pada saat debat dipengaruhi secara sosiopolitik tidak dapat dilepaskan dari sifat budaya politik pemilih lokal di Indonesia. Sebagai negara yang menganut tingkat kesopanan normatif tinggi, para kandidat debat cenderung menghindari adanya agresi verbal yang masif di ruang publik yang mengakibatkan turunnya elektabilitas kandidat itu sendiri. Selain itu, propaganda dalam kampanye politik di Indonesia juga didasarkan pada prinsip

moral politik yang berakar pada Pancasila (Marzuki et al., 2025). Demokrasi harus dijalankan dalam koridor etika politik yang menjunjung tinggi moralitas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial dan konstitusional.

Sebagai petahana, kandidat pemenang (1) tidak hanya menggunakan fungsi *acclaim* untuk menyampaikan visi misi, melainkan untuk mengingatkan masyarakat kinerja politik yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan aktif. Dalam menyampaikan pendapatnya, kandidat pemenang membagi penyampaian hasil kinerjanya ke dalam tiga kategori yang langsung berdampak kepada masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Penyampaian ujaran-ujaran ini disampaikan runut serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum.

“...diantaranya pada saat sekarang dan sangat dirasakan oleh masyarakat kami bisa memberikan kesehatan gratis cukup pakai KTP untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan dan ini berlaku di seluruh Indonesia untuk orang yang ber-KTP Kabupaten Pekalongan. Dengan kesehatan gratis kami menunjang juga dengan kami membuat rumah sakit besar yang sedang dibangun dengan nilainya kurang lebih 270 miliar tahap pertama sudah dibangun di rumah sakit Kraton Wiradesa. Kami juga membangun puskesmas-puskesmas yang sekarang kami jadikan untuk rawat inap agar masyarakat kami di daerah atas tidak harus turun ke bawah. Kami membangun rumah sakit yang tadinya Puskesmas bisa menjadi rumah sakit Kesesi dan itu menjadi rumah sakit tipe D yang sekarang sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan.”

Selain bidang kesehatan, fungsi *acclaim* juga digunakan untuk menyoroti kinerja kandidat pemenang di bidang pendidikan sebagaimana berikut:

“...pendidikan Kabupaten Pekalongan pada saat pandemi covid semua merosot dengan tajam di mana Kabupaten Pekalongan ranking ke-34 untuk Merdeka Belajar dari 35 Kabupaten se-Jawa tengah pada saat saya belum menjadi Bupati.”

... Alhamdulillah dengan waktu yang singkat dan walaupun kerja keras kami mungkin belum maksimal dari ranking ke-34 dari 35 se-Jawa Tengah kita 2023 ranking 1 se-Jawa Tengah dan juga kita ranking keempat se-Indonesia untuk Merdeka Belajar untuk Kabupaten Pekalongan”

Dua kutipan ujaran di atas memperlihatkan bahwa kandidat pemenang menggunakan fungsi *acclaim* melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah ia menjabat. Melalui kedua ujaran di atas, kandidat pemenang membangun legitimasi politik yang kuat di hadapan pemilih. Perbedaan kondisi pendidikan yang kontras saat sebelum dan sesudah kandidat pemenang menjadi Bupati pada periode saat menjadi alat yang ampuh untuk menyasar psikologi masyarakat. Fungsi *acclaim* digunakan sebagai pesan terselubung bahwa keberlanjutan kepemimpinan mereka adalah pilihan paling rasional untuk mempertahankan prestasi daerah. Melalui narasi komparatif ini, kandidat pemenang sukses mengunci persepsi publik bahwa mereka adalah figur pemimpin yang telah terbukti memberikan solusi nyata (*proven leader*) pada sektor pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Selain peningkatan ranking, kandidat pemenang juga menyampaikan riwayat pemberian insentif rutin untuk 1000 guru-guru pesantren per tahun selama kandidat pemenang menjabat. Jika dilihat dari sudut pandang *Rational Choice Theory* oleh Dawns (1957) dimana motivasi individu untuk membuat suatu keputusan dipengaruhi oleh keuntungan yang akan didapatkan. Melalui pemberian insentif secara rutin, kandidat pemenang dengan mudah mengunci loyalitas calon pemilih di tingkat akar rumput. Para pendidik akan memilih program yang menguntungkan mereka, serta menghindari risiko kehilangan jaminan kesejahteraan yang sudah berjalan selama beberapa tahun apabila tampuk kekuasaan berpindah ke kandidat yang kalah (paslon nomor 2). Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Asmuni & Kosandi (2018) dimana politik uang sangat memengaruhi keputusan politik individu. Fungsi *acclaim* pada program insentif ini bukan sekadar pemaparan kinerja, melainkan sebuah instrumen politik

elektoral yang efektif untuk merawat basis massa dan mengamankan kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

Disisi lain, kandidat yang kalah menggunakan fungsi *acclaim* untuk menyampaikan visi-misi politiknya. Secara garis besar, terdapat sembilan program kerja yang diunggulkan kandidat kalah yakni, peningkatan profesionalitas ASN selaku pelayan masyarakat dan aksesibilitas *e-government*, pemerataan infrastruktur publik, menmbangun masyarakat yang religius, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, menmumbu kembangkan sistem ekonomi Pancasila sebagai basis perekonomian rakyat, peningkatan upaya Fasilitas petani dan nelayan, pengembangan potensi wisata, menumbuh kembangkan kerukunan hiduo beragama, bergotong royong, dan berbudu pekerti, serta memperhatikan kesejahteraan guru dari sektor informal, karang taruna, KNPI, pelaku seni dan budayawan, mendorong masyarakat untuk mengadakan *event-event* keolahragaan dan kepramukaan.

Kandidat kalah tidak memiliki rekam jejak untuk dijadikan *bargaining power* kepada calon pemilih. Sebagai gantinya, mereka menyampaikan visi-misi yang mengakomodir seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Penjabaran visi-misi ini terkesan memberikan deretan janji panjang yang terkesan kurang realistis. Kandidat ini juga berulang kali menggunakan istilah yang tidak familiar di masyarakat seperti “ekonomi pancasila”, “Trisakti Bung Karno”, dan “amanat penderitaan rakyat”.

“Lima, menumbuh kembangkan sistem ekonomi Pancasila sebagai basis perekonomian rakyat”

Selanjutnya, kandidat kalah menggunakan wacana *attack* lebih banyak daripada kandidat menang. Temuan ini memiliki kemiripan dengan hasil studi Shanti et al., (2025), bahwa terdapat persamaan perilaku pada kandidat kalah. Pada studii Shanti, kandidat kalah mendominasi penggunaan fungsi *attack* sebanyak 6% untuk menjatuhkan kandidat lawan, sementara pada penelitian ini, ditemukan bahwa kandidat kalah menggunakan fungsi ini dalam jumlah yang lebih tinggi (27%) dibanding kandidat pemenang sebagai petahana. Hal ini menunjukkan pola dimana kandidat yang unggul secara elektoral, menggunakan ujaran yang bersifat penyerangan untuk menurunkan legitimasi politik lawan.

Perbedaan kedua kandidat dalam menyampaikan *policy* menjadi bukti empiris mengapa H2 pada penelitian ini diterima. Kandidat menang menjadikan rekam jejak sebagai senjata utama untuk mempertahankan pendukung lama sekaligus menjaring pendukung baru, sementara kandidat kalah menjual janji masa depan untuk meraih simpati publik. Hasil uji Chi-Square dimana $X^2(2, N = 305) = 53,604, p < 0,001$ mengindikasikan bahwa posisi politik memengaruhi bagaimana tiap kandidat menyampaikan visi, misi dan rencana kerjanya. Kandidat O1 secara masif memamerkan rekam jejak keberhasilan di masa lalu (*past deeds*), sedangkan kandidat O2 justru lebih banyak menyampaikan rencana untuk masa depan (*future plans*).

Selanjutnya, komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki format baku dan regulasi prosedural sebagaimana yang dijelaskan oleh Shanti et al., (2025). KPU membagi sesi debat kedalam segmen-segmen yang bersifat mekanistik seperti pemaparan visi-misi dan program kerja pada awal acara dan pemberian durasi bicara yang sangat singkat. Hal ini mendorong setiap kandidat untuk memproduksi ujaran bersifat *acclaim* untuk menarik simpati massa sebanyak mungkin. Namun, pemberian durasi ini mereduksi peluang tiap kandidat untuk mempertanyakan (*attack*) visi-misi dan program kerja lawan debat.

Sebagai contoh, kandidat menang melakukan penyerangan terhadap kandidat kalah dengan mendegradasi visi-misi yang mereka usung dengan ujaran yang berbunyi “*kalau di sana masih berangan-angan kalau di sini sudah bekerja.*” Hal ini bertujuan untuk membuat pemilih ragu dengan kapabilitas kandidat kalah.

Berbeda dengan kandidat menang, kandidat kalah justru menyerang klaim-klaim sepihak yang disampaikan oleh kandidat menang.

“Bapak tadi mengatakan bahwa pembangunan rob itu adalah suatu jasa dari ibu itu salah besar pak bangunan itu adalah terintegrasi dan itu adalah dana dari pusat pak mohon izin.

Kemudian itu pak saat ini yang belum selesai karena apa karena di sungai Sengo itu butuh long storage pak long storage itu pada saat ada rob maka dia tidak melimpah ke kiri dan ke kanan maka dibutuhkan long storage.”

Berdasarkan ujaran tersebut, terlihat bahwa kandidat kalah meruntuhkan klaim sepihak yang dilakukan oleh kandidat menang dengan mendelegitimasi kepemilikan proyek sebagai program pemerintah yang didanai oleh pemerintah pusat bukan daerah. Selanjutnya, kandidat kalah menyerang kelemahan teknis dari proyek yang belum rampung. Kedua serangan ini menciptakan persepsi bahwa kebijakan yang dilakukan kandidat menang belum sempurna.

Selanjutnya, data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa *defense* merupakan fungsi yang paling sedikit digunakan oleh kedua kandidat. Secara umum, strategi bertahan jarang digunakan karena umumnya serangan berfokus pada kelemahan kandidat, sehingga pembelaan dapat mengalihkan kandidat dari pesan utama. Membela diri terhadap serangan dapat mengingatkan atau memberi tahu orang-orang tentang potensi kelemahan. Terakhir, pembelaan dapat membuat kandidat tampak reaktif daripada proaktif (Benoit, 2008). Maka dari itu, saat kandidat kalah menyerang kandidat menang mengenai penanganan sampah, kandidat menang hanya menyampaikan bantahan seperlunya dan menambahkan ujaran yang bersifat *acclaim* kembali.

“...tetapi hari ini pemerintah Kabupaten sudah menyiapkan dalam jangka yang sangat pendek adalah motor-motor untuk membuang sampah kalau saya boleh menyebut merek motor Tosa itu yang punya ban dua lalu di belakang ada stangnya kira-kira begitu itu untuk membuang sampah (defense).”

“dan beberapa anggota DPRD juga melaksanakan itu untuk konstituennya ini satu terobosan-terobosan yang memang harus kita pertahankan (defense)”

“...sekali lagi Bapak Ibu sekalian membangun Pekalongan itu tidak bisa berdiri sendiri harus sinergi dengan pemerintahan yang ada hari ini dengan pemerintahan pusat dengan pemerintahan provinsi dengan pemerintahan desa dengan juga dengan komponen-komponen eksternal yang ada. jadi istilahnya pentahelix ada tujuh komponen yang harus kita ajak turut serta untuk membangun Kabupaten Pekalongan termasuk sektor-sektor swasta dan seluruh peran masyarakat Bapak Ibu kira-kira itu sekali lagi tanggal 27 November kita coblos nomor urut kita coblos (acclaim).”

Temuan pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian Sonnsjö (2024). Bagi Sonnsjö (2024), isu kebijakan (*policy*), yang dikemukakan kandidat tidak pernah bersifat netral. Setiap kebijakan yang disampaikan merupakan komoditas politik yang sarat akan kepentingan individu maupun golongan. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris melalui uji hipotesis kedua yang memperlihatkan perbedaan tema kebijakan yang diangkat masing-masing kandidat. Pada penelitian Sonnsjö (2024), kandidat debat memilih untuk mengangkat isu-isu tertentu yang dianggap krusial untuk menguji *audience*, sedangkan dalam debat Pilkada di Kabupaten Pekalongan, kandidat menang membatasi pembahasan kebijakan pada hal-hal vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mempertahankan citra positif.

Secara keseluruhan, eksplorasi terhadap dinamika komunikasi politik dalam debat ini memberikan kontribusi kritis bagi pemahaman mengenai efektivitas institusi debat dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Keceragaman fungsi wacana pada level makro menunjukkan bahwa debat pilkada memiliki risiko struktural untuk terjebak menjadi sekadar ritual politik teatral yang bersifat performatif akibat ketatnya regulasi prosedural KPU dan tingginya kehati-hatian kontestan terhadap risiko budaya. Namun, signifikansi yang sangat tinggi pada perbedaan pengemasan isu kebijakan menyelamatkan institusi debat ini dari kepalsuan substansi, karena berhasil menyediakan diferensiasi pilihan politik yang tegas bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kuantitatif atas isi debat Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi politik para peserta menampilkan kontradiksi khusus antara keseragaman wacana makro dan polarisasi tajam pada kebijakan mikro. Pada level makro, kedua kandidat mendominasi panggung debat dengan ujaran yang bersifat *acclaim* dan menahan intensitas *attack*. Namun pada level substansi, dinamika elektoral memunculkan pemisahan temporal yang jelas. Kandidat 01 yang keluar sebagai pemenang mengandalkan pendekatan retrospektif dengan menonjolkan rekam jejak masa lalu (*past deeds*) sebagai bukti kompetensi nyata, sementara kandidat 02 yang kalah menggunakan pendekatan prospektif dengan menekankan rencana ke depan (*future plans*) untuk menawarkan harapan baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ikhsan Fuady, S.Sos., M.Si., Bapak Kunto Adi Wibowo, S.Sos., M.I.Kom., dan Dzikrifa Ningtyas Aliifa, S.I.Kom., M.I.Kom. atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dukungan akademik, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajilore, O. O. (2015). Acclaims, attacks and defences in Nigerian gubernatorial debate. *Discourse & Communication*, 9(1), 3–18. <https://doi.org/10.1177/1750481314555261>
- Aliifa, D. N., Putri, W. E., & Mirawati, I. (2025). Analisis framing Semetko & Valkenburg pada media detik.com dan tempo.co terkait bencana hidrometeorologi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 004–119. <https://doi.org/10.33822/jep.v8i1.10085>
- Asmuni, M. B., & Kosandi, M. (2020). Faktor politik uang dalam perilaku memilih masyarakat pada Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik - Pemerintahan)*, 3(2), 71–85. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1597>
- Benoit, W. (2008). Functional theory of political campaign discourse. In *Encyclopedia of U.S. campaigns, elections, and electoral behavior* (p. 260). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412963886.n132>
- Benoit, W. L., & Harthcock, A. (1999). Functions of the great debates: Acclaims, attacks, and defenses in the 1960 presidential debates. *Communication Monographs*, 66(4), 341–357. <https://doi.org/10.1080/03637759909376477>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Damayanti, N. (2015). Gaya komunikasi Jokowi pada debat politik Pilpres 2014. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 14(2), 153–163. <https://doi.org/10.32509/wacana.v14i2.103>
- Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Dudek, P., & Partacz, S. (2009). Functional theory of political discourse: Televised debates during the parliamentary campaign in 2007 in Poland. *Central European Journal of Communication*, 2(2), 367–379. <https://bibliotekanauki.pl/articles/471200.pdf>
- Fiorina, M. P. (1978). Economic retrospective voting in American national elections: A micro-analysis. *American Journal of Political Science*, 22(2), 426–443.
- Fukuoka, Y. (2013). Decentralization and local democracy in Indonesia: Direct elections for local executives. *Asian Journal of Political Science*, 21(2), 150–170.
- Hidayah, A. U., & Kweldju, S. (2022). A functional approach to the 2019 Indonesian presidential debate. *Journal of Language, Literature, and Arts*, 2(9), 1305–1317. <https://doi.org/10.17977/um064v2i92022p1305-1317>

- Iskandar, F. (2020). Analisis wacana politik debat publik calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.177>
- Marzuki, Al Abdu, T., Wantika, A., Sinaga, A. S., & Siagian, J. Y. (2025). Propaganda dalam strategi kampanye politik: Dialektika moral politik dan demokrasi substantif dalam bingkai pemilu di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(1), 125–139. <https://doi.org/10.14421/egzayt94>
- Marzuki, Hadad, A., & Ratulangi, D. (2025). Retorika dan teknik debat politik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 560–574. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5689>
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- Mulantara, M., Wibowo, K. A., Fuady, I., & Rahmawan, D. (2025). Strategic discourse in a non-competitive election debate: Content analysis of the 2024 West Papua gubernatorial campaign. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 13(3), 343–349. <https://journal.stikosa-aws.ac.id/index.php/spektrum/article/view/977/490>
- Norris, P. (2000). *A virtuous circle: Political communications in postindustrial societies*. Cambridge University Press.
- Perloff, R. M. (1998). *Political communication: Politics, press, and public in America*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Riffe, D., Lacy, S., Fico, F., & Watson, B. (2019). *Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research* (4th ed.). Routledge.
- Shanti, N. K. R. P., Fuady, I., & Wibowo, K. A. (2025). Analisis functional theory dan personal qualities dalam debat Pilkada Kalimantan Selatan 2024. *Jurnal Politik Profetik*, 13(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/profetik.v13i2a2>
- Sonnsjö, H. (2024). What we talk about when we talk about electricity: A thematic analysis of recent political debates on Swedish electricity supply. *Energy Policy*, 187, Article 114053. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114053>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Weninggalih, L., & Fuady, M. E. (2021). Hubungan kampanye politik calon presiden 2019 melalui media sosial Instagram dengan keputusan memilih mahasiswa Indonesia di Thailand. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i1.79>
- Wiwid. (2024). Strategi kampanye Partai Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif 2024: Pendekatan teori marketing-mix. *Jurnal Politik Profetik*, 12(1), 37–63. <https://doi.org/10.24252/profetik.v12i1a3>